



RENCANA KERJA

/ TAHUN 2024

disdukcapil
Jabar

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung Tlp. (022) 2031044 - 2031405 / 2031405
www.disdukcapil.jabarprov.go.id - dukcapil@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

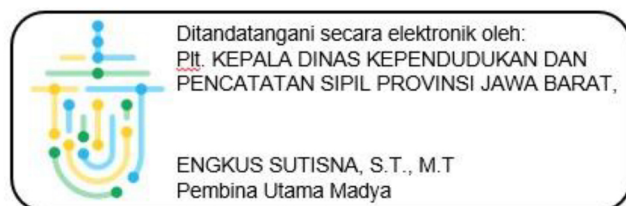
Rencana Kerja tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2024 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2024, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Tahun 2024 ini belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja ini.

Bandung, Juli 2023

Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat



D5770A535B

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II..... | 8 |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL..... | 8 |
| PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 | 8 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 | 8 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... | 15 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | 15 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 19 |
| 2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan..... | 28 |
| BAB III | 30 |
| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 30 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 30 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil | 31 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 32 |
| BAB IV | 43 |
| PENUTUP..... | 43 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel T-II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2023 | 9 |
| Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan | 17 |
| Tabel T-II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat | 18 |
| Tabel T-II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024..... | 20 |
| Tabel T-II.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat | 29 |
| | |
| Tabel T-III. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat..... | 33 |
| Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Barat tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat;
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

1.3. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

- 2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

Menjelaskan *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024.

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

- 3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menilai pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2023 yang dibandingkan dengan Renstra Disdukcapil Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Disdukcapil Tahun 2023 merencanakan 5 program dan 12 kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 12 kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Disdukcapil sampai dengan Tahun 2023, disajikan dalam tabel di bawah ini :

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi) | | Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|---|--|-------|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|---|---------------|--|------------|-------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|--|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | I | | II | | | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 9 | Dokum | 34,488,000,000 | 6 | 17,764,909,135 | 3 | 18,465,115,975 | - | 1,982,775,665 | - | 2,525,789,640 | - | 4,508,565,305 | - | 24.42 | 6 | 22,273,474,440 | 66.67 | 64.58 | | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya gaji dan tunjangan | 42 | Bulan | 34,053,000,000 | 28 | 17,694,004,772 | 14 | 18,405,115,975 | 3 | 1,976,309,665 | 4 | 2,521,231,940 | 7 | 4,497,541,605 | 50.00 | 24.44 | 35 | 22,191,546,377 | 83.33 | 65.17 | Sekretariat | |
| 2 | 12 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD | 9 | Lap | 435,000,000 | 6 | 70,904,363 | 3 | 60,000,000 | - | 6,466,000 | 2 | 4,557,700 | 2 | 11,023,700 | 66.67 | 18.37 | 8 | 81,928,063 | 88.89 | 18.83 | Sekretariat | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | 58.33 | 21.40 | | | 86.11 | 42.00 | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya | 135 | Orang | 2,035,000,000 | 12 | 751,650,545 | 45 | 46,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 751,650,545 | 8.89 | 36.94 | | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 135 | Orang | 224,000,000 | 90 | - | 45 | 46,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 66.67 | - | Sekretariat | |
| 2 | 12 | 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan se Jawa Barat | 9 | Kali | 1,476,000,000 | 9 | 589,400,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 589,400,645 | 100.00 | 39.93 | Sekretariat | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota | 12 | Kali | 335,000,000 | 12 | 162,249,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 162,249,900 | 100.00 | 48.43 | Sekretariat | | |
| Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 44.18 | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | 36 | Bulan | 5,456,000,000 | 24 | 2,966,366,339 | 12 | 1,805,596,473 | 4 | 473,459,852 | 4 | 599,657,699 | 8 | 1,073,117,551 | 66.67 | 59.43 | 32 | 4,039,483,890 | 88.89 | 74.04 | Sekretariat | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 36 | Bulan | 1,657,000,000 | 24 | 827,939,459 | 12 | 635,186,617 | 4 | 129,465,200 | 5 | 309,548,473 | 9 | 439,013,673 | 75.00 | 69.12 | 33 | 1,266,953,132 | 91.67 | 76.46 | Sekretariat | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan logistik penanganan covid 19 DAK Non Fisik | 12 | Jenis | 183,000,000 | 12 | 84,887,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 84,887,000 | 100.00 | 46.39 | Sekretariat | | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyediaan rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 36 | Bulan | 3,616,000,000 | 24 | 2,053,539,880 | 12 | 1,170,409,856 | 4 | 343,994,652 | 3 | 290,109,226 | 7 | 634,103,878 | 58.33 | 54.18 | 31 | 2,687,643,758 | 86.11 | 74.33 | Sekretariat | |
| Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | 66.67 | 61.65 | | | 92.59 | 65.72 | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Rendah | | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | | | | |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | | |
|---|------------|--|--|---|-------|--|---------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|---|--------------|--|---------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | I | | II | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat | 36 | Bulan | 4,875,000,000 | 24 | 2,388,859,193 | 12 | 1,311,833,500 | 3 | 201,133,958 | 3 | 369,629,882 | 6 | 570,763,840 | 50.00 | 43.51 | 30 | 2,959,623,033 | 83.33 | 60.71 | Sekretariat | |
| | 2 | 12.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36 | Bulan | 950,000,000 | 24 | 280,814,961 | 12 | 98,820,000 | 3 | 17,242,560 | 3 | 18,178,260 | 6 | 35,420,820 | 50.00 | 35.84 | 30 | 316,235,781 | 83.33 | 33.29 | Sekretariat |
| | 2 | 12.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 36 | Bulan | 3,925,000,000 | 24 | 2,108,044,232 | 12 | 1,213,013,500 | 3 | 183,891,398 | 3 | 351,451,622 | 6 | 535,343,020 | 50.00 | 44.13 | 30 | 2,643,387,252 | 83.33 | 67.35 | Sekretariat |
| Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | 50.00 | 39.99 | | | 83.33 | 50.32 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Tinggi | Rendah | | | | | |
| 2 | 12.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36 | Bulan | 2,140,000,000 | 24 | 1,208,349,016 | 12 | 364,954,480 | 3 | 67,573,870 | 3 | 32,460,238 | 6 | 100,034,108 | 50.00 | 27.41 | 30 | 1,308,383,124 | 83.33 | 61.14 | Sekretariat | |
| | 2 | 12.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36 | Bulan | 700,000,000 | 24 | 514,321,013 | 12 | 183,133,000 | 3 | 50,577,550 | 3 | 29,101,850 | 6 | 79,679,400 | 50.00 | 43.51 | 30 | 594,000,413 | 83.33 | 84.86 | Sekretariat |
| | 2 | 12.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | 36 | Bulan | 770,000,000 | 24 | 325,234,946 | 12 | 117,061,480 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 325,234,946 | 66.67 | 42.24 | Sekretariat | |
| | 2 | 12.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 36 | Bulan | 670,000,000 | 24 | 368,793,057 | 12 | 64,760,000 | 3 | 16,996,320 | 3 | 3,358,388 | 6 | 20,354,708 | 50.00 | 31.43 | 30 | 389,147,765 | 83.33 | 58.08 | Sekretariat |
| Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | 33.33 | 24.98 | | | 77.78 | 61.73 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Tinggi | Rendah | | | | | |
| Rata-rata Capaian kinerja Program (%) | | | | | | | | | | | | | | 41.11 | 37.52 | | | 70.74 | 55.51 | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Sedang | Rendah | | | | | |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | | | | |
|--|------|--|--|---|--|--|----------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---------------|--|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|-------|-------|------|--|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | I | | II | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | 83.25 | Persen | 1,336,000,000 | 83.92 | 501,615,325 | 83.25 | 420,000,000 | - | 95,438,126 | 50.00 | 106,795,900 | 50.00 | 202,234,026 | 60.06 | 48.15 | 134 | 703,849,351 | 160.86 | 52.68 | FPAK | | |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk | 81 | Kab/Kota | 668,000,000 | 54 | 338,091,004 | 27 | 285,000,000 | 4 | 19,436,626 | 10 | 83,987,000 | 14 | 103,423,626 | 51.85 | 36.29 | 68 | 441,514,630 | 83.95 | 66.10 | FPAK | | |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 03 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | Jumlah pengelolaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk | 81 | Kab/Kota | 668,000,000 | 54 | 338,091,004 | 27 | 285,000,000 | 4 | 19,436,626 | 10 | 83,987,000 | 14 | 103,423,626 | 51.85 | 36.29 | 68 | 441,514,630 | 83.95 | 66.10 | FPAK | |
| Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | 51.85 | 36.29 | | | 83.95 | 66.10 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | Tinggi | Sedang | | | | | | | |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan | 81 | Kab/Kota | 668,000,000 | 54 | 163,524,321 | 27 | 135,000,000 | 10 | 76,001,500 | 10 | 22,808,900 | 20 | 98,810,400 | 74.07 | 73.19 | 74 | 262,334,721 | 91.36 | 39.27 | FPAK | | |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 01 | Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota | 18 | dokumen | 668,000,000 | 12 | 163,524,321 | 6 | 135,000,000 | 3 | 76,001,500 | 2 | 22,808,900 | 5 | 98,810,400 | 83.33 | 73.19 | 17 | 262,334,721 | 94.44 | 39.27 | FPAK | |
| Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | 83.33 | 73.19 | | | 94.44 | 39.27 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sedang | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja Program (%) | | | | | | | | | | | | | | | 62.96 | 54.74 | | | 87.65 | 85.73 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Tinggi | Tinggi | | | | | | | |
| 2 | 12 | 03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 83.25 | Persen | 1,532,000,000 | 90.45 | 716,516,107 | 83.25 | 394,344,637 | - | 68,810,964 | 50.00 | 141,441,924 | 50.00 | 210,252,888 | 60.06 | 53.32 | 140 | 926,768,995 | 168.71 | 60.49 | FPAK | | |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil | 81 | Kab/Kota | 1,532,000,000 | 54 | 716,516,107 | 27 | 394,344,637 | 6 | 68,810,964 | 6 | 141,441,924 | 12 | 210,252,888 | 44.44 | 53.32 | 66 | 926,768,995 | 81.48 | 60.49 | FPAK | | |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 02 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil | 18 | elemen | 1,012,000,000 | 12 | 551,060,158 | 6 | 259,344,637 | 1 | 22,838,640 | 4 | 91,073,760 | 5 | 113,912,400 | 83.33 | 43.92 | 17 | 664,972,558 | 94.44 | 65.71 | FPAK | |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 04 | Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ Kota | 18 | dok | 520,000,000 | 12 | 165,455,949 | 6 | 135,000,000 | 2 | 45,972,324 | 2 | 50,368,164 | 4 | 96,340,488 | 66.67 | 71.36 | 16 | 261,796,437 | 88.89 | 50.35 | FPAK | |
| Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | 75.00 | 57.64 | | | 91.67 | 58.03 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Rendah | | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja Program (%) | | | | | | | | | | | | | | | 60.06 | 53.32 | | | 81.48 | 50.16 | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Tinggi | Rendah | | | | | | | |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022 | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan | | | |
|---|---------------|--|---|---|--------|--|-------|---|-------|---------------------------------|----|-------------|-------|--|--|--|-------|---|--------------|--|------------|-------|------|--|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | I | | II | | | | K | Rp. | K | Rp. | | | K | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi | 84.78 | Persen | 3,440,000,000 | 83.57 | 1,176,626,956 | 84.78 | 765,000,000 | - | 156,118,980 | 50.00 | 170,251,930 | 50.00 | 326,370,910 | 58.98 | 42.66 | 134 | 1,502,997,866 | 157.55 | 43.69 | PIAK | |
| 2 | 12.04.1.02 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 96 | Dokum | 2,190,000,000 | 64 | 592,448,250 | 32 | 310,000,000 | 8 | 77,822,000 | 8 | 100,754,410 | 16 | 178,576,410 | 50.00 | 57.61 | 80 | 771,024,660 | 83.33 | 35.21 | PIAK | |
| 2 | 12.04.1.02.01 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 81 | Dokum | 990,000,000 | 54 | 284,876,680 | 27 | 175,000,000 | 16 | 77,822,000 | 3 | 37,971,910 | 19 | 115,793,910 | 70.37 | 66.17 | 73 | 400,670,590 | 90.12 | 40.47 | PIAK | |
| 2 | 12.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah rapat (sosialisasi/fgd) dalam rangka pemanfaatan data kependudukan Jawa Barat | 12 | Rapat | 1,200,000,000 | 8 | 307,571,570 | 4 | 135,000,000 | - | - | 2 | 62,782,500 | 2 | 62,782,500 | 50.00 | 46.51 | 10 | 370,354,070 | 83.33 | 30.86 | PIAK | |
| Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | 60.19 | 56.34 | | | 86.73 | 35.67 | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | |
| 2 | 12.04.1.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi | 81 | Kab/Ko | 1,250,000,000 | 54 | 584,178,706 | 27 | 455,000,000 | 10 | 78,296,980 | 8 | 69,497,520 | 18 | 147,794,500 | 66.67 | 32.48 | 72 | 731,973,206 | 88.89 | 58.56 | PIAK | |
| 2 | 12.04.1.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 81 | Dok | 675,000,000 | 54 | 412,659,900 | 27 | 300,000,000 | 4 | 18,617,280 | 5 | 64,097,520 | 9 | 82,714,800 | 33.33 | 27.57 | 63 | 495,374,700 | 77.78 | 73.39 | PIAK | |
| 2 | 12.04.1.03.02 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 324 | orang | 575,000,000 | 216 | 171,518,806 | 108 | 155,000,000 | 27 | 59,679,700 | 20 | 5,400,000 | 47 | 65,079,700 | 43.52 | 41.99 | 263 | 236,598,506 | 81.17 | 41.15 | PIAK | |
| Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | 38.43 | 34.78 | | | 79.48 | 57.27 | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | Tinggi | Rendah | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja Program (%) | | | | | | | | | | | | | | | 58.33 | 45.04 | | | 86.11 | 46.88 | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.
2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2023 dan untuk tahun 2022 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel II.3.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman;
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan membahagiakan masyarakat;
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
4. Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten/kota yang akan menerapkan SIAK terpusat;
 - b. Seluruh Kabupaten/Kota siap melaksanakan SIAK terpusat Tahun 2023;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota melatih dan menyediakan petugas Administrator Database Kependudukan (ADB) untuk dijadikan sebagai super user SIAK terpusat;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota menyiapkan para operator SIAK yang akan dilatih Tim Teknis.

2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan membahagiakan masyarakat
 - a. Dengan budaya kerja dan semangat “Dukcapil BISA” memaknai bahwa Berkarya, Inisatif/Inovatif, Sabar, Amanah/Adaptif harus terus dibangun, sebagai passion dalam pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
 - b. Penerbitan Identitas Kependudukan merupakan hulu dari pelayanan administrasi kependudukan melalui NIK bagi Penduduk;
 - c. Evaluasi terhadap layanan Dukcapil dalam penambahan indikator terkait penerapan buku pokok pemakaman/pelaporan kematian dari desa/kelurahan dengan target minimal 10 per kabupaten/kota;
 - d. Merealisasikan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk, digital dalam genggaman;

- g. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara lain: melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor Induk Kependudukan, mewujudkan pelayanan yang cepat/tidak membiarkan penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat.
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
 - a. Sinkronisasi data Kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Melaksanakan koordinasi, evaluasi terkait Data Kependudukan.
 4. Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024
 - a. Koordinasi Sinkronisasi data penduduk dan data pemilih akan dilakukan secara terpusat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak perlu menyerahkan data penduduk by name by address kepada KPUD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota menuntaskan perekaman KTP-el termasuk mulai melakukan perekaman terhadap pemilih pemula tahun 2023 dan 2024 melalui perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas data kependudukan.

Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi yang rendah | Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan di Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> - Akurasi data kependudukan . - Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan belum optimal - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang masih rendah - Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan masih di bawah target |

Tabel T-II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2021 (n-2) | Tahun 2022 (n-1) | Tahun 2023 (n) | Tahun 2024 (n+1) | Tahun 2021 (n-2) | Tahun 2022 (n-1) | Tahun 2023 (n) | Tahun 2024 (n+1) | |
| 1 | Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat | | | | 82,63% | 83,47% | 84,28% | NA | 84,81% | 84,47% | NA | NA | |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel T-II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

| No. | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan Tahun 2024 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024 | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | Sumber Dana |
|-----|---|---|---|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Satuan | Lokasi | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Target Capaian Kinerja | Satuan | Lokasi | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A | Nilai | | 18,250,000,000 | A | Nilai | | 16,421,203,981 | APBD |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | B | Nilai | | | B | Nilai | | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai dengan ketentuan | 10 | Dokumen | Jawa Barat | 350,000,000 | 10 | Dokumen | Jawa Barat | 265,000,000 | APBD |
| 1.1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | Dokumen | Jawa Barat | 250,000,000 | 7 | Dokumen | Jawa Barat | 210,000,000 | APBD |
| 1.2 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 100,000,000 | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 55,000,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 3 | Laporan | Kota Bandung | 12,100,000,000 | 3 | Laporan | Kota Bandung | 10,240,000,000 | APBD |
| 2.1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 59 | Orang/Bulan | Kota Bandung | 12,000,000,000 | 59 | Orang/Bulan | Kota Bandung | 10,200,000,000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|---------|--------------|---------------|----|---------|--------------|---------------|------|
| | | | Tunjangan ASN | | | | | | | g | | |
| 2.2 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 17 | Laporan | Kota Bandung | 100,000,000 | 17 | Laporan | Kota Bandung | 40,000,000 | APBD |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi | 27 | Orang | Jawa Barat | 100,000,000 | 27 | Orang | Jawa Barat | 30,000,000 | APBD |
| 3.1 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 27 | Orang | Jawa Barat | 100,000,000 | 27 | Orang | Jawa Barat | 30,000,000 | APBD |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi | 12 | Laporan | Kota Bandung | 2,300,000,000 | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,623,203,981 | APBD |
| 4.1 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | Kota Bandung | 300,000,000 | 3 | Paket | Kota Bandung | 117,000,000 | APBD |
| 4.2 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | Kota Bandung | 100,000,000 | 5 | Paket | Kota Bandung | 70,000,000 | APBD |
| 4.3 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 9 | Paket | Kota Bandung | 150,000,000 | 9 | Paket | Kota Bandung | 30,000,000 | APBD |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | Paket | Kota Bandung | 150,000,000 | 5 | Paket | Kota Bandung | 190,000,000 | APBD |
| 4.5 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | Jawa Barat | 1,600,000,000 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 1,216,203,981 | APBD |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan) | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,600,000,000 | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,360,000,000 | APBD |
| 5.1 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | Kota Bandung | 100,000,000 | 12 | Laporan | Kota Bandung | 100,000,000 | APBD |
| 5.2 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,500,000,000 | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,260,000,000 | APBD |
| 6 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | 62 | Unit | Kota Bandung | 900,000,000 | 62 | Unit | Kota Bandung | 1,120,000,000 |
| 6.1 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 | Paket | Kota Bandung | 200,000,000 | 30 | Paket | Kota Bandung | 250,000,000 | APBD |
| 6.2 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya | 32 | Unit | Kota Bandung | 700,000,000 | 32 | Unit | Kota Bandung | 870,000,000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|------|--------------|-------------|----|------|--------------|---------------|------|
| | | | yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | 27 | Unit | Kota Bandung | 900,000,000 | 27 | Unit | Kota Bandung | 1,783,000,000 | APBD |
| 7.1 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | Kota Bandung | 100,000,000 | 1 | Unit | Kota Bandung | 41,000,000 | APBD |
| 7.2 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 | Unit | Kota Bandung | 350,000,000 | 26 | Unit | Kota Bandung | 145,000,000 | APBD |
| 7.3 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 75 | Unit | Kota Bandung | 100,000,000 | 75 | Unit | Kota Bandung | 70,000,000 | APBD |
| 7.4 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | Kota Bandung | 200,000,000 | 1 | Unit | Kota Bandung | 1,500,000,000 | APBD |
| 7.5 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | Unit | Kota Bandung | 150,000,000 | 5 | Unit | Kota Bandung | 27,000,000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | litasi | | | | | | | | | |
| II | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota | 97.89 | Persen | Jawa Barat | 650,000,000 | 97.89 | Persen | Jawa Barat | 637,500,000 | APBD |
| 1 | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | | Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 450,000,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 385,000,000 | APBD |
| 1.1 | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 4 | Dokumen | Jawa Barat | 250,000,000 | 4 | Dokumen | Jawa Barat | 285,000,000 | APBD |
| 1.2 | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 200,000,000 | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 100,000,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 200,000,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 252,500,000 | APBD |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | yang diterbitkan | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 5 | Laporan | Jawa Barat | 200,000,000 | 5 | Laporan | Jawa Barat | 252,500,000 | APBD |
| III | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota | 99.00 | Persen | Jawa Barat | 550,000,000 | 99.00 | Persen | Jawa Barat | 282,500,000 | APBD |
| 1 | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | | Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 550,000,000 | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 282,500,000 | APBD |
| 1.1 | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 400,000,000 | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 182,500,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | | Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 150,000,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 100,000,000 | APBD |
| 2.1 | | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kotata | 5 | Laporan | Jawa Barat | 150,000,000 | 5 | Laporan | Jawa Barat | 100,000,000 | APBD |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | Persentase Data yang dimanfaatkan | 80.00 | Persen | Jawa Barat | 975,000,000 | 80.00 | Persen | Jawa Barat | 780,000,000 | APBD |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi | | Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi | 31 | Dokumen | Jawa Barat | 450,000,000 | 31 | Dokumen | Jawa Barat | 396,500,000 | APBD |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | Administrasi Kependudukan Provinsi | | yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 4 | Laporan | Jawa Barat | 250,000,000 | 4 | Laporan | Jawa Barat | 221,500,000 | APBD |
| 1.2 | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 200,000,000 | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 175,000,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | Jumlah Laporan Kab/Kota yang terbina dan terawasi sesuai ketentuan | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 525,000,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 383,500,000 | APBD |
| 2.1 | | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan | 12 | Laporan | Jawa Barat | 350,000,000 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 283,500,000 | APBD |
| 2.2 | | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi | 54 | Orang | Jawa Barat | 175,000,000 | 54 | Orang | Jawa Barat | 100,000,000 | APBD |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri | 100 | Persen | Jawa Barat | 250,000,000 | 100 | Persen | Jawa Barat | 170,000,000 | APBD |
| 1 | Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan | | Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 250,000,000 | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 170,000,000 | APBD |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|------------|-----------------------|---|---------|------------|-----------------------|-------------|
| 1.1 | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 150,000,000 | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 100,000,000 | APBD |
| Jumlah Anggaran Rancangan Awal RKPD | | | | | | | 20,675,000,000 | Jumlah Anggaran Hasil Analisis Kebutuhan | | | 18,291,203,981 | APBD |

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah melakukan sesuai dengan mekanisme Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana mekanisme yang dilakukan dalam usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah, dimana Forum Perangkat Daerah sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrembang kab/kota dengan Perangkat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Mekanisme yang dilaksanakan pada Forum Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan tim penyelenggara oleh Kepala Perangkat Daerah yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan
- b. Tim penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - Mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi yang berasal dari delegasi kabupaten/kota yang terkait dengan fungsi Perangkat Daerah skala Provinsi;
 - Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk Forum Perangkat Daerah;

2. Tahap Pelaksanaan

- a. *Expose Mapping Positioning* Pelayanan Adminduk di Kabupaten/Kota oleh pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. *Expose* Usulan Bantuan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Barat oleh pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemaparan tentang Penyelenggaraan Inovasi Pembangunan Kompetitif melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Pemaparan tentang Penatusahaan dan Pencairan Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Ddaerah Provinsi Jawa Barat;

- e. Perumusan hasil kesepakatan setelah dilaksanakannya diskusi tanya jawab Antara narasumber dengan peserta Forum Perangkat Daerah.
3. Tahap Pasca Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi
 - a. Menyusun Berita Acara;
 - b. Menyusun pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi.

Diharapkan dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah diperoleh output yang diinginkan guna mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat.

Tabel T-II.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;
3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2024 sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T-III. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|---|--|---|----------------|
| 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1.1 Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 210,000,000 |
| | | 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55,000,000 |
| | 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10,200,000,000 |
| | | 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | 40,000,000 |
| | 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30,000,000 |
| | 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 117,000,000 |
| | | 1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 70,000,000 |
| | | 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30,000,000 |
| | | 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 190,000,000 |
| | | 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1,216,203,981 |
| | 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100,000,000 |
| | | 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1,260,000,000 |
| | 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | 1.6.1 Pengadaan Mebel | 250,000,000 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|-------|--|---------------|
| | | | Urusan Pemerintah Daerah | 1.6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 870,000,000 |
| | | 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41,000,000 |
| | | | | 1.7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 145,000,000 |
| | | | | 1.7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70,000,000 |
| | | | | 1.7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1,500,000,000 |
| | | | | 1.7.5 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan | 27,000,000 |
| | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 2.1 | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | 2.1.1 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 285,000,000 |
| | | | | 2.1.2 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | 100,000,000 |
| | | 2.2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 2.2.1 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 252,500,000 |
| 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 3.1 | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | 3.1.1 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | 182,500,000 |
| | | | | 3.1.2 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota | 100,000,000 |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 4.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 4.1.1 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 221,500,000 |
| | | | | 4.1.2 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 175,000,000 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|-------|--|-----------------------|
| | | 4.2 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 4.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 283,500,000 |
| | | | | 4.2.2 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 100,000,000 |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 5.1 | Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan | 5.1.1 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | 70,000,000 |
| | | | | 5.1.2 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 100,000,000 |
| Jumlah Kebutuhan Dana | | | | | | 18,291,203,981 |

Jumlah Belanja Operasi untuk Tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif **Rp. 18,291,203,981,-** (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan Tahun 2024 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024 | Rencana Kerja dan Pendanaan 2024 | | | | Rencana Kerja dan Pendanaan 2025 | | | | Sumber Dana |
|-----|---|---|---|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Satuan | Lokasi | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | Target Capaian Kinerja | Satuan | Lokasi | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A | Nilai | | 16,421,203,981 | A | Nilai | | 18,605,000,000 | APBD |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | B | Nilai | | | B | Nilai | | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai dengan ketentuan | 10 | Dokumen | Jawa Barat | 265,000,000 | 10 | Dokumen | Jawa Barat | 275,000,000 | APBD |
| 1.1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | Dokumen | Jawa Barat | 210,000,000 | 7 | Dokumen | Jawa Barat | 215,000,000 | APBD |
| 1.2 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 55,000,000 | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 60,000,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 3 | Laporan | Kota Bandung | 10,240,000,000 | 3 | Laporan | Kota Bandun g | 12,045,000,000 | APBD |
| 2.1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 59 | Orang/Bulan | Kota Bandung | 10,200,000,000 | 59 | Orang/Bulan | Kota Bandun | 12,000,000,000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----|---------|--------------|---------------|----|---------|--------------|---------------|------|
| | | | Tunjangan ASN | | | | | | | g | | |
| 2.2 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 17 | Laporan | Kota Bandung | 40,000,000 | 17 | Laporan | Kota Bandung | 45,000,000 | APBD |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi | 19 | Orang | Jawa Barat | 30,000,000 | 20 | Orang | Jawa Barat | 50,000,000 | APBD |
| 3.1 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 19 | Orang | Jawa Barat | 30,000,000 | 20 | Orang | Jawa Barat | 50,000,000 | APBD |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi | 1 | Laporan | Kota Bandung | 1,623,203,981 | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,735,000,000 | APBD |
| 4.1 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | Paket | Kota Bandung | 117,000,000 | 3 | Paket | Kota Bandung | 125,000,000 | APBD |
| 4.2 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | Paket | Kota Bandung | 70,000,000 | 5 | Paket | Kota Bandung | 75,000,000 | APBD |
| 4.3 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 9 | Paket | Kota Bandung | 30,000,000 | 9 | Paket | Kota Bandung | 35,000,000 | APBD |
| 4.4 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang | 5 | Paket | Kota Bandung | 190,000,000 | 5 | Paket | Kota Bandung | 200,000,000 | APBD |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----|---------|--------------|----------------------|----|---------|------------|----------------------|-------------|
| | | | Disediakan | | | | | | | | | |
| 4.5 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | Jawa Barat | 1,216,203,981 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 1,300,000,000 | APBD |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan) | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,360,000,000 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 1,425,000,000 | APBD |
| 5.1 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | Kota Bandung | 100,000,000 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 125,000,000 | APBD |
| 5.2 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | Kota Bandung | 1,260,000,000 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 1,300,000,000 | APBD |
| 6 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi | 62 | Unit | Kota Bandung | 1,120,000,000 | 62 | Unit | Jawa Barat | 1,175,000,000 | APBD |
| 6.1 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 | Paket | Kota Bandung | 250,000,000 | 30 | Paket | Jawa Barat | 275,000,000 | APBD |
| 6.2 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 | Unit | Kota Bandung | 870,000,000 | 32 | Unit | Jawa Barat | 900,000,000 | APBD |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik | | Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | 27 | Unit | Kota Bandung | 1,783,000,000 | 27 | Unit | Jawa Barat | 1,900,000,000 | APBD |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|------|
| 7.1 | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 | Unit | Kota Bandung | 41,000,000 | 4 | Unit | Kota Bandung | 50,000,000 | APBD |
| 7.2 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 | Unit | Kota Bandung | 145,000,000 | 26 | Unit | Kota Bandung | 150,000,000 | APBD |
| 7.3 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 75 | Unit | Kota Bandung | 70,000,000 | 75 | Unit | Kota Bandung | 100,000,000 | APBD |
| 7.4 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | Kota Bandung | 1,500,000,000 | 1 | Unit | Kota Bandung | 1,550,000,000 | APBD |
| 7.5 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | Kota Bandung | 27,000,000 | 1 | Unit | Kota Bandung | 50,000,000 | APBD |
| II | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota | 97.89 | Persen | Jawa Barat | 637,500,000 | 98.19 | Persen | Jawa Barat | 850,000,000 | APBD | |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-------|----------|------------|-------------|-------|----------|------------|-------------|------|
| 1 | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | | Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 385,000,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 550,000,000 | APBD |
| 1.1 | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 4 | Dokumen | Jawa Barat | 285,000,000 | 4 | Dokumen | Jawa Barat | 300,000,000 | APBD |
| 1.2 | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 100,000,000 | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 250,000,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 252,500,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 300,000,000 | APBD |
| 2.1 | | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 5 | Laporan | Jawa Barat | 252,500,000 | 5 | Laporan | Jawa Barat | 300,000,000 | APBD |
| III | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota | 99.00 | Persen | Jawa Barat | 282,500,000 | 99.05 | Persen | Jawa Barat | 325,000,000 | APBD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-------|----------|------------|-------------|-------|----------|------------|-------------|------|
| 1 | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | | Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 282,500,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 325,000,000 | APBD |
| 1.1 | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 182,500,000 | 12 | Dokumen | Jawa Barat | 200,000,000 | APBD |
| 2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | | Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 100,000,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 125,000,000 | APBD |
| 2.1 | | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kotata | 5 | Laporan | Jawa Barat | 100,000,000 | 5 | Laporan | Jawa Barat | 125,000,000 | APBD |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | Persentase Data yang dimanfaatkan | 80.00 | Persen | Jawa Barat | 780,000,000 | 82.50 | Persen | Jawa Barat | 875,000,000 | APBD |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti | 30 | Dokumen | Jawa Barat | 396,500,000 | 31 | Dokumen | Jawa Barat | 450,000,000 | APBD |
| 1.1 | | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 4 | Laporan | Jawa Barat | 221,500,000 | 1 | Laporan | Jawa Barat | 250,000,000 | APBD |
| 1.2 | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan | 7 | Dokumen | Jawa Barat | 175,000,000 | 1 | Dokumen | Jawa Barat | 200,000,000 | APBD |

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-----|----------|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------|-------------|
| 2 | | | Jumlah Laporan Kab/Kota yang terbina dan terawasi sesuai ketentuan | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 383,500,000 | 27 | Kab/Kota | Jawa Barat | 425,000,000 | APBD |
| 2.1 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan | 12 | Laporan | Jawa Barat | 283,500,000 | 12 | Laporan | Jawa Barat | 300,000,000 | APBD |
| 2.2 | Administrasi Kependudukan Provinsi | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi | 54 | Orang | Jawa Barat | 100,000,000 | 54 | Orang | Jawa Barat | 125,000,000 | APBD |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri | 100 | Persen | Jawa Barat | 170,000,000 | 100 | Persen | Jawa Barat | 250,000,000 | APBD |
| 1 | | | Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 170,000,000 | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 250,000,000 | APBD |
| 1.1 | Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 100,000,000 | 3 | Dokumen | Jawa Barat | 150,000,000 | APBD |
| Jumlah Anggaran Tahun 2024 | | | | | | | 18,291,203,981 | Jumlah Anggaran Tahun 2025 | | | 20,905,000,000 | APBD |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2024 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2024.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2024 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2024 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.